

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun rencana kerja (RENJA) tahun 2019.

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta,

KEPALA

Agus Tri Haryono, ST.MT
NIP. 19720306 1996031 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1 – I.3
1.2. Landasan Hukum	I.3 - I.4
1.3. Maksud dan Tujuan	I.4 - I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I.5 - I.7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	II.1 - II.3
2.2. Analisis Pelayanan OPD	II.3 - II.5
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	II.5 - II.9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.9- II.10
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.10- II.11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III.1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III.1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	III.1
3.3. Program dan Kegiatan	III.2
BAB IV PENUTUP	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan jangka pendek/1 tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja SKPD untuk tahun 2019.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja SKPD, berdasarkan pada PP nomor 18 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pada dokumen Renja Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya berdasarkan pada nomenklatur program dan kegiatan termaksud yang bersifat internal beserta pagu indikatif yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2017 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 serta melanjutkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah ***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”***. Dan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijabarkan ke dalam Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sarana Prasarana / Infrastruktur kota yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
2. Mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni melalui fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .
3. Meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam mendukung Kota Yogyakarta Sejahtera, Mandiri, Nyaman dan Berbudaya .

1. LANDASAN HUKUM

Kewajiban daerah untuk menyusun Renja Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Perundangan ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional .
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018.
2. Bahan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.
4. Instrumen bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ.

Adapun penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang pekerjaan umum & perumahan

- 5 Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LKIP, LPPD, dan LKPJ.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterkaitan antara Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.
- Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Memuat kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu (tahun n-2), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), serta pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada laporan kinerja tahunan OPD atau realisasi APBD.

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian layanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, penjelasan tentang proses bagaimana usulan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas program nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berisi hasil perumusan atas tujuan dan sasaran Renja OPD yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

C. Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan

yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

(1) EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pada pelaksanaan Renja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Pelaksanaan Renja Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah tahun 2016, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada Tabel II.A.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2017

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang Direncanakan

Berdasarkan Seluruh program yang direncanakan pada tahun 2017 secara umum semua capaian program yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 16 (enambelas) Semua Program kegiatan pencapaiannya sudah 100 % .

2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan

Dari 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebesar 7 (tujuh) program yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

- 2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
- 2.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2.4 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase
- 2.5 Program Pembangunan Gedung Pemerintah
- 2.6 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 2.7 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

- 3.1 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / kegiatan

4.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :

- 4.1.1 Keterbatasan Anggaran
- 4.1.2 Adanya kajian ulang terhadap pekerjaan

4.2 Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan :

- 4.2.1 Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan
- 4.2.2 Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu)
- 4.2.3 Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan
- 4.2.4

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada .

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
- Memperketat pengawasan di lapangan

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Pencapaian Renstra Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Akhir Tahun 2016 disajikan dengan format tabel 2.1 : (dalam Excel)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Renstra Tahun 2017 – 2022 analisis kinerja tidak mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil atas analisis kinerja pelayanan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah selengkapnya disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

NO	Indikator *)	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		standar nasional	(PP-6/08)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan			82 %	84 %	86 %	88 %	82 %		86 %	88 %	
2	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan			21 %	30 %	40 %	50 %	27,55 %		47 %	57 %	
3	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud			73 %	73,50 %	74 %	74,50%	75 %		74,50 %	75 %	
4	Prosentase Drainase Kondisi Baik/Pembuangan air tidak terhambat			90,73%	91,29 %	91,85 %	92,42%	90,73%		91,85%	92,42%	
5	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan			86 %	87 %	88 %	89 %	86 %		88 %	89 %	
6	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman			91,8 %	93 %	94,2 %	95,5 %	91,8 %		94,2 %	95,5 %	
7	Persentase cakupan saluran air			83,22 %	84 %	84,06 %	85,0%	83,22%		84,06%	85,09%	

limbah yang memadai												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

1. Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan ,dan bangunan gedung pemerintah yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengairan, drainase, bina marga, penerangan jalan umum, air limbah, permukiman ,perumahan, dan bangunan gedung pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- (1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- (2) Pengelolaan kebinamargaan .
- (3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- (4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan Saluran air limbah .
- (5) Pengelolaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum .
- (6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis.

Permasalahan berkaitan dengan penanganan infrastruktur :

- a. Sebagian besar saluran drainase, baik saluran tertutup maupun terbuka, memiliki sedimentasi berupa sampah, kotoran dan tanah yang mengakibatkan terganggunya aliran sehingga tidak lancar dan menggenang.
- b. Pembangunan saluran drainase khususnya di lingkungan permukiman tidak diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan saluran, sehingga banyak saluran yang tidak/kurang terpelihara dengan baik.
- c. Adanya genangan air yang sering terjadi karena kurang selarasnya sistem jaringan drainase dengan laju perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan kota.

- d. Masih adanya tumpang tindih pemanfaatan saluran. Terdapatnya saluran air hujan yang juga digunakan untuk pembuangan air limbah, dan pada saluran yang lain juga berfungsi sebagai saluran irigasi.
- e. Rata-rata dimensi saluran kurang mencukupi akan kebutuhan debit drainase yang diperlukan.
- f. Banyaknya bangunan baik permanen dan semi permanen di bantaran sungai yang mengganggu konstruksi talud pengaman sungai.
- g. Banyaknya karamba yang dipasang oleh masyarakat menyebabkan terganggunya aliran sungai bahkan bisa membelokkan arah aliran yang menyebabkan rusaknya tanggul sungai.
- h. Begitu cepatnya laju perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan diperlukannya infrastruktur permukiman.
- i. Usia talud yang rata-rata sudah berumur diatas 20 tahun sehingga perlu direhabilitasi.
- j. Konstruksi talud yang rata-rata terlalu curam kemiringannya dan kurang ketebalannya.
- k. Penanganan permukiman kumuh di kota Yogyakarta yang baru tertangani 60 ha dari luasan 264,89 ha , sehingga masih ada 204 ha yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Apabila permasalahan yang ada dalam mencapai target kinerja dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Yogyakarta akan mempengaruhi tujuan dari visi misi kepala daerah sesuai dengan visi misi , dimana Tema Dalam sasaran pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “ Menciptakan Sarana Prasarana Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya yang Berkualitas serta Permukiman yang Layak Huni dan Sehat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan “

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam mensikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada

untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan optimal.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi adalah :

a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan penataan ruang
- 4) Adanya semangat kerja yang cukup strategis.
- 5) Masih tersedianya sarana prasarana yang cukup memadai.
- 6) Memiliki tupoksi yang cukup strategis.

b. Tantangan :

- 1) Mengefektifkan dan mengefisiensikan dana yang terbatas
- 2) Tuntutan kebutuhan sarana prasarana yang berkualitas
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana yang memadai

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta 2017, yaitu :

- Program yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan drainase menjadi prioritas utama dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase
- Diperlukan adanya program yang fokus terhadap upaya pembinaan dan pengelolaan prasarana dasar permukiman ,sanitasi permukiman, perumahan, dan saluran air limbah dengan kegiatan :
 - a) Penataan Perumahan dan Permukiman
 - b) Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c) Pengelolaan Rusunawa

d) Pengelolaan Air Limbah

- Diperlukan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kebinamargaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan kegiatan :
 - a) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Diperlukan sarana pendukung penerangan jalan kota melalui kegiatan :
 - a] Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
- Diperlukan adanya program untuk meningkatkan sarana prasarana kerja pemerintah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai standar teknis dan kebutuhan dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah
 - b) Pembangunan Gedung Pemerintah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman , dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh bidang dengan mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman , isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Review dari hasil analisis dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan yaitu :

Secara lengkap review terhadap RKPD Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.3 terlampir.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman .

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum SKPD. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam Renja tahun 2019, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan kondisi di lapangan, bukan menjadi skala prioritas, dan keterbatasan anggaran .

Perencanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, mendasar pada :

- a. Program dinas berdasar data teknis yang ada pada dinas .
- b. Usulan masyarakat langsung
- c. Usulan melalui musrenbang

Dari sekian banyak usulan terutama usulan dari musrenbang tidak semua dapat terakomodir dalam kegiatan di dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skala prioritas yang dapat diusulkan pada kegiatan dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kota yogyakarta adalah yang menyangkut kerusakan yang dampaknya dapat membahayakan bagi keselamatan masyarakat .

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkait dengan urusan pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta disajikan dalam tabel 2.4 dalam tabel terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi.

Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maupun kota.

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Berkualitas Serta Perumahan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat

3.2.2 Sasaran

Sasaran dari rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan
- Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkatkan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2017-2022 , tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu penting yang berkaitan dengan bidang lingkungan, usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Wilayah Kota Yogyakarta di tahun 2019 adalah sebanyak 7 (tujuh) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi .
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- c. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung / Bangunan kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
- b. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

- 1) Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase
- 2) Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan

- a. Penataan Perumahan dan Permukiman
- b. Penataan Bangunan dan Permukiman
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- d. Pengelolaan Rusunawa
- e. Pengelolaan Saluran Air Limbah

(tabel 3.1) Tabel rumusan program dan Kegiatan , terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ini telah disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai dengan format Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang selanjutnya akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019. Rumusan program dan kegiatan yang disusun telah merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja 2017 yang lalu, identifikasi isu-isu penting bidang pekerjaan umum, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, review atas rencana awal RKPD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Beberapa usulan program dan kegiatan untuk tahun 2019 terlihat membutuhkan beban pendanaan yang cukup besar karena Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta perlu meningkatkan pengelolaan infrastruktur kota diberbagai sektor , karena masih banyak sarana dan prasarana kota yang masih harus ditingkatkan maupun diperbaiki . Besar harapan bahwa rencana kerja akan memperoleh pendanaan yang sesuai kebutuhan demi kelancaran penyelenggaraan ketugasan.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	UMBULHARJO	Materai 6000 yang tersedia	400 buah	932,849,550	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	UMBULHARJO	Materai 6000 yang tersedia	400 buah	932,849,550				
			Materai 3000 yang tersedia	450 buah					Materai 3000 yang tersedia		450 buah			
			Jasa Pengiriman/paket	10 kali					Jasa Pengiriman/paket		10 kali			
			STNK roda 4 yang terbayar	3 unit					STNK roda 4 yang terbayar		3 unit			
			STNK roda 2 yang terbayar	15 unit					STNK roda 2 yang terbayar		15 unit			
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		7 jenis			
			Jasa kebersihan kantor	12 bulan					Jasa kebersihan		12 bulan			
			Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis					Alat tulis kantor yang tersedia		50 jenis			
			Jasa percetakan	1 jenis					Jasa percetakan		1 jenis			
			Jasa Penggandaan	250.000 lembar					Jasa Penggandaan		250.000 lembar			
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis					Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 jenis			
			Pembayaran listrik	12 bulan					Pembayaran listrik		12 bulan			
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis					Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		4 jenis			
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis					Peraturan perundang-undangan yang tersedia		5 jenis			
			Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis					Jasa perbaikan peralatan kerja		3 jenis			
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis					Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		6 jenis			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali				Jasa pemeliharaan peralatan dan	20 kali		
			Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis				Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis		
			Jasa pemeliharaan taman	12 bulan				Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		
			Pengadaan pakaian dinas harian	130 buah				Pengadaan pakaian dinas harian	130 buah		
			Pakaian Kerja lapangan	126 buah				Pakaian Kerja lapangan	126 buah		
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	UMBULHARJO	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	512,191,440	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	UMBULHARJO	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	512,191,440	
			dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN				dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN		
			Jasa Tenaga Bantuan	1 orang				Jasa Tenaga Bantuan	1 orang		
3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	UMBULHARJO	Makan dan minum yang tersedia untuk :	-	332,820,000	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	UMBULHARJO	Makan dan minum yang tersedia untuk :	-	332,820,000	
			a.koordinasi,	24 kali				a.koordinasi,	24 kali		
			b.pegawai	53 orang				b.pegawai	53 orang		
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 laporan				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 laporan		
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	1,070,181,000	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				1,070,181,000	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	UMBULHARJO -	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 Jenis	216,800,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	UMBULHARJO -	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 Jenis	216,800,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Uraian Kegiatan	Lokasi	Uraian Kegiatan	Volume	Estimasi Biaya	No	Uraian Kegiatan	Volume	Estimasi Biaya		
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UMBULHARJO	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a.roda 4 (empat), b.roda 2 (dua)	- 2 unit 13 unit	853,381,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	UMBULHARJO	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, a.roda 4 (empat), b.roda 2 (dua)	- 2 unit 13 unit	853,381,000	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	291,500,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan				291,500,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	UMBULHARJO	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) frekuensi diklat formal yang diikuti	5 dokumen 5 dokumen 2 kali	291,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	UMBULHARJO	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, frekuensi diklat formal yang diikuti	5 dokumen 5 dokumen 2 kali	291,500,000	
IV	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	87%	43,350,000,000	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta			43,350,000,000	
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	DED Pembangunan Gedung Pemerintah	7 Dokumen	925,000,000	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	DED Pembangunan Gedung Pemerintah	7 Dokumen	925,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Kategori Kegiatan	Lokasi	Detail Kegiatan	Luas / Volume	Estimasi Biaya	Kategori Kegiatan	Lokasi	Detail Kegiatan	Luas / Volume	Estimasi Biaya	
2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	Pembangunan Gedung Pemerintah	3 Bidang Bangunan	42,425,000,000	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta	Pembangunan Gedung Pemerintah	3 Bidang Bangunan	42,425,000,000	
V	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas saluran Pengairan /Penyediaan Bangunan Talud	73.50%	27,865,056,000	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	Kota Yogyakarta			39,870,576,000	
			Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak terhambat	93.50%							
1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	1813 m	20,000,000,000	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	1813 m	32,005,520,000	
2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	1800 m	7,865,056,000	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	1800 m	7,865,056,000	
VI	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan , Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	92.85%	42,515,648,024	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			54,684,014,972	
			Persentase kualitas penerangan jalan umum	96%							
1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Peningkatan Jalan, Peningkatan Jembatan	28.000 m2 , 1 buah	15,000,000,000	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Peningkatan Jalan, Peningkatan Jembatan	28.000 m2 , 1 buah	17,281,525,000	
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Peningkatan Trotoar	900 m2	9,402,489,972	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta	Peningkatan Trotoar	900 m2	9,402,489,972	
3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	18,113,158,052	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel	1.900 titik	28,000,000,000	
		Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	579 titik	Penggantian Lampu PJU habis umur pakai				579 titik			
		Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	Pembayaran rekening air dan rekening listrik				12 bulan			
		Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	Pemeliharaan lampu Hias				13 unit			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	PERUMAHAN					PERUMAHAN					
VII	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	93.50%	16,042,202,593	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Kota Yogyakarta			16,042,202,593	
			Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	80%							
1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta	Pembangunan Talud Permukiman	100 m'	5,390,000,000	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta	Pembangunan Talud Permukiman	100 m'	5,390,000,000	
			Sarana Prasarana Air Minum	4 unit				Sarana Prasarana Air Minum	4 unit		
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Penataan Kawasan Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	3 Kawasan 13 unit bangunan	4,760,000,000	Kegiatan Penataan Bangunan dan		Penataan Kawasan Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	3 Kawasan 13 unit bangunan	4,760,000,000	
3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Rusunawa	Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	509,363,391	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Rusunawa	Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	509,363,391	
4	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta	Operasional Pengelolaan Saluran air limbah	540 m	5,382,839,202	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta	Operasional Pengelolaan Saluran air limbah	540 m	5,382,839,202	
TOTAL					131,134,587,617					155,308,474,565	

	Rancangan Awal RKPD	Hasil Analisis Kebutuhan	Catatan Penting
--	---------------------	--------------------------	-----------------

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman											131,134,587,617	133,363,875,608	
Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
	Pekerjaan Umum												
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					992,965,257	992,965,257	
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor			UMBULHARJO			Materai 6000 yang tersedia	400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	443,412,000	443,412,000	sedang berjalan
							Materai 3000 yang tersedia	450 buah					
							Jasa Pengiriman/paket	10 kali					
							STNK roda 4 yang terbayar	3 unit					
							STNK roda 2 yang terbayar	15 unit					
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis					
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan					
							Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis					
							Jasa percetakan	1 jenis					
							Jasa Penggandaan	250.000 lembar					
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis					
							Pembayaran listrik	12 bulan					
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis					
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis					
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis					
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis					
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali					
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis					
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan					
							Pengadaan pakaian dinas harian	130 buah					
							Pakaian Kerja lapangan	126 buah					

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			UMBULHARJO			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	279,953,257	279,953,257	sedang berjalan
						dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN						
						Jasa Tenaga Bantuan	1 orang						
3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi			UMBULHARJO			Makan dan minum yang tersedia untuk :	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	269,600,000	269,600,000	sedang berjalan
						a.koordinasi,	24 kali						
						b.pegawai	53 orang						
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48 laporan						
II	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%			647,342,286	647,342,286	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UMBULHARJO -			Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	143,525,000	143,525,000	sedang berjalan
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			UMBULHARJO			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	503,817,286	503,817,286	sedang berjalan
						a.roda 4 (empat),	2 unit						
						b.roda 2 (dua)	13 unit						
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat		Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan			100%			222,500,000	222,500,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			UMBULHARJO			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	222,500,000	222,500,000	sedang berjalan

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB		
							frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		
IV	Program Pembangunan Gedung Pemerintah		Terpenuhinya bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan	Kota Yogyakarta	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai dengan standar kebutuhan	87%					40,883,335,780	40,883,335,780	
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota Yogyakarta	Pembangunan Gedung Pemerintah		Dokumen DED	12 Dokumen			883,335,780	883,335,780	Baru
2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Kota Yogyakarta	Pembangunan Gedung Pemerintah			5 Unit			40,000,000,000	40,000,000,000	Baru
V	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya saluran pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas saluran Pengairan /Penyediaan Bangunan Talud	73.5%					23,518,515,571	25,747,803,560	
					Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak terhambat	93.50%							
1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	Pembuatan Saluran Drainase		Kota Yogyakarta			Pembangunan Saluran Drainase			Kota Yk	12,387,986,915	14,617,274,904	Baru
2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta	Peningkatan Pengairan, Peningkatan Drainase		Peningkatan Saluran Pengairan			Kota Yk	11,130,528,656	11,130,528,656	Baru
VI	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penyediaan Sarana Prasarana	Terwujudnya Pengelolaan Jalan dan Jembatan agar memberikan Pelayanan yang memadai dan Berkualitas	Kota Yogyakarta	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan , Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	92.85%					45,078,445,332	45,078,445,332	
					Persentase kualitas penerangan jalan umum	96%							
1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Peningkatan Jalan, Peningkatan Jembatan	28.000 m2 , 1 buah	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	4 ruas jalan	11,427,500,000	11,427,500,000	Baru
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Peningkatan Trotoar	900 m2	Terlaksananya peningkatan bangunan pelengkap jalan	2 ruas jalan	8,586,994,332	8,586,994,332	Baru

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yk	25,063,951,000	25,063,951,000	Baru
							Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	579 titik	Terlaksananya penggantian Lampu PJU habis umur pakai				
							Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	Terlaksananya pembayaran rekening air dan rekening listrik				
							Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	Terlaksananya pemeliharaan lampu hias				
	PERUMAHAN												
VII	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Terwujudnya perumahan dan permukiman yang memadai dan berkualitas	Kota Yogyakarta	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	93.50%					19,791,483,391	19,791,483,391	
					Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	80%							
1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman			Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	100 m'	Tersedianya sarana prasarana dasar permukiman	wilayah kota Yk	3,651,742,826	3,651,742,826	Baru
							Sarana Prasarana Air Minum	4 unit					
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan						Penataan Kawasan	3 Kawasan	Terpeliharanya sarana prasarana dasar permukiman	Kota Yk	2,604,877,174	2,604,877,174	
							Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	13 unit bangunan					
3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa			Rusunawa			Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	Terkelolanya rusunawa		524,863,391	524,863,391	Baru
4	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah			Kota Yogyakarta							13,010,000,000	13,010,000,000	Baru
TOTAL											131,134,587,617	133,363,875,606	

Program : 7 Program
Kegiatan : 17 Kegiatan

Kode Kegiatan	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas daerah	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			

SKPD Penanggung
Jawab



Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan
Kawasan Permukiman



SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

SKPD Penanggung
Jawab

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku kepentingan
Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerjaan Umum				
I	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah				
2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah				
II	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase				
2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
III	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kota Yogyakarta			
3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Kota Yogyakarta			
	PERUMAHAN				
IV	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan	Kota Yogyakarta			
1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman	Kota Yogyakarta			
2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan				
3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Rusunawa			
4	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Kota Yogyakarta			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
TOTAL					